



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JASWADI**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR II**
3. NHK : **261601**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.417.000.000**

1. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI , Rp. 2.050.000.000
3. Tanah Seluas 118 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 567.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 323.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS DS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU SIRION AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 75.800.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 842.220.955**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 286.482.265**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 300.460.166

Sub Total

Rp. 5.245.463.386

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.245.463.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.